

## Enam Kali Pemprov Sulbar Raih Opini WTP



Sumber foto: <https://cdn2.tstatic.net/makassar/foto/bank/images/kepala-bpk-p6.jpg>

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, kembali raih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019. Predikat WTP yang diraih Pemprov Sulbar disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sulbar dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD 2019 yang berlangsung di Gedung DPRD Sulbar, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Kamis (25/6/2020) sore. Keberhasilan Pemprov Sulbar dalam mempertahankan predikat opini WTP dari BPK RI merupakan yang keenam kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2015.

Gubernur Sulbar, Ali Baal, bersyukur dan menyampaikan terima kasih, serta penghargaan kepada kepala BPK Perwakilan Sulawesi Barat beserta jajarannya atas keberhasilan daerah memperoleh predikat WTP Tahun 2019. "Alhamdulillah, hari ini kita menerima LHP dari BPK RI dengan hasil meraih predikat opini

WTP, ini berkat kerja keras kita semua, tanpa terkecuali,"ucap Ali Baal dalam rapat paripurna istimewa DPRD.

Karena itu, dalam forum terhormat tersebut Ali Baal menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK atas masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan. Terhadap beberapa kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan, lanjut Ali Baal, adalah merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka perbaikan ke depan, dan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. "Sebagai bentuk kesungguhan untuk perbaikan dimaksud, kami telah menyusun rencana aksi yang dalam pelaksanaannya, kami berharap bimbingan dan arahan dari badan pemeriksa keuangan, sehingga tindak lanjut hasil audit dapat selesai tepat waktu,"ujarnya.

Menurutnya, yang dirasakan pemerintah daerah selama ini, BPK tidak sebatas melakukan pemeriksaan. lebih dari itu, memberi pembinaan dan bimbingan, khususnya kepada pengelola keuangan untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah. "Terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan pimpinan dan para anggota DPRD Sulbar, BPKP Perwakilan Sulbar, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian LKPD Peovinsi Sulbar Tahun Anggaran 2019," ucapnya.

Dia mengatakan, seluruh pencapaian yang menghasilkan opini WTP yang keenam kalinya untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, merupakan buah kolaborasi antara Pemprov Sulbar, DPRD Sulbar, Forkopimda, instansi vertikal dan stakeholder lainnya yang selalu mendukung, memberikan support, bahkan kritik yang konstruktif untuk perbaikan. "Semoga lebih baik lagi, kita mampu mewujudkan slogan "Millete Diatonganan" dengan *zero corruption*,"tutur Ali Baal.

Ketua DPRD Sulbar, Hj Sitti Suraidah Suhardi, juga menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Pemprov Sulbar, kembali meraih opini WTP Tahun 2019. "Ini semua tidak terlepas dari kerjasama semua elemen di Sulawesi Barat, utamanya arahan dan bimbingan dari BPK Perwakilan Sulbar, sehingga WTP enam kali berturut-turut, dapat kita raih,"ujar Suraidah.

**Sumber:**

Makassar.Tribunnews.com, *Enam Kali Pemprov Sulbar Raih Opini WTP*, Kamis 25 Juni 2020.

<https://makassar.tribunnews.com/2020/06/25/enam-kali-pemprov-sulbar-raih-opini-wtp>

**Catatan:**

Catatan:

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada :

- (1) kesesuaian dengan standar akuntansi;
- (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
- (3) kepatuhan terhadap peraturan-perundangan; dan
- (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas pemeriksaan laporan keuangan. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa:

1. Wajar Tanpa Pengecualian – WTP (*unqualified opinion*);

Opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

2. Wajar Dengan Pengecualian – WDP (*qualified opinion*);

Opini wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

3. Opini Tidak Wajar – TW (*adverse opinion*);

Opini tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat – TMP (*disclaimer of opinion*);

Pernyataan menolak memberikan opini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.